

OPTIMALISASI PENGELOLAAN SISTEM APLIKASI INFORMASI DI LINGKUNGAN SKPA PROVINSI ACEH

Teuku Muhammad Mirza Keumala^{1*}

¹*Ilmu Komputer, Fakultas Sains, Teknologi dan Ilmu Kesehatan, Universitas Bina Bangsa Getsempena*

Corresponding author:
Email: mirza@bbg.ac.id

Abstract

Optimizing the management of information system applications is a crucial aspect in improving government performance and public service quality. This community service program aims to enhance human resource capacity and optimize the utilization of information system applications within the Aceh Provincial Government Work Units (SKPA). The implementation method consists of several stages, including needs assessment, system development and implementation using the Agile approach, socialization and training, as well as monitoring, evaluation, and assistance. The results indicate significant improvements in system quality, information quality, and service quality. The level of system adoption increased, with user satisfaction exceeding 85%. In addition, operational efficiency improved, as evidenced by a reduction in task completion time by up to 40%. The program also enhanced the technical competencies of human resources in managing information systems. Overall, this initiative provides a meaningful contribution to digital transformation within SKPA and has the potential to be replicated in other government institutions.

Keywords: information systems, e-government, community service, digital transformation, SKPA

Abstrak

Optimalisasi pengelolaan sistem aplikasi informasi menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintahan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) serta mengoptimalkan pemanfaatan sistem aplikasi informasi di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) Provinsi Aceh. Metode pelaksanaan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan dan identifikasi kebutuhan, pengembangan dan implementasi sistem berbasis Agile, sosialisasi dan pelatihan, serta monitoring, evaluasi, dan pendampingan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan yang signifikan. Tingkat adopsi sistem oleh pengguna meningkat, dengan tingkat kepuasan mencapai lebih dari 85%. Selain itu, efisiensi operasional meningkat dengan pengurangan waktu penyelesaian tugas hingga 40%. Kegiatan ini juga berhasil meningkatkan kompetensi teknis SDM dalam pengelolaan aplikasi informasi. Secara keseluruhan, program ini memberikan kontribusi nyata dalam mendukung transformasi digital di lingkungan SKPA dan berpotensi untuk direplikasi pada instansi pemerintah lainnya.

Kata kunci: sistem informasi, SPBE, pengabdian masyarakat, transformasi digital, SKPA.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah menjadi pendorong utama transformasi dalam tata kelola pemerintahan modern. Penerapan sistem berbasis digital tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu administratif, tetapi juga sebagai strategi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pelayanan publik. Implementasi *electronic government* (e-government) di berbagai negara menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mampu meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus efisiensi kinerja organisasi pemerintahan (Supriyanto, 2016; Lee & Moon, 2020). Selain itu, evolusi pemerintahan digital menuntut adanya adaptasi berkelanjutan dalam pengelolaan sistem informasi agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis (Janowski, 2015).

Di Indonesia, penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi bagian penting dalam reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Penerapan SPBE bertujuan untuk menciptakan integrasi sistem yang lebih efektif serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang akurat. Namun, keberhasilan implementasi SPBE sangat bergantung pada kesiapan organisasi, kualitas sumber daya manusia (SDM), serta tata kelola teknologi informasi yang baik (Pakaya et al., 2026; Gil Garcia & Pardo, 2005). Selain itu, faktor lain seperti *digital mindset*, pemahaman *good governance*, dan kompetensi digital aparatur juga berperan penting dalam membentuk aparatur sipil negara yang adaptif terhadap perubahan teknologi (Saraswati et al., 2025).



This article is distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



Provinsi Aceh sebagai salah satu daerah yang terus mendorong transformasi digital dalam pemerintahan telah mengimplementasikan berbagai aplikasi informasi di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Aplikasi-aplikasi tersebut digunakan untuk mendukung pengelolaan administrasi, pengolahan data, serta pelayanan kepada masyarakat. Inovasi berbasis aplikasi digital dalam pemerintahan daerah terbukti mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan organisasi jika dikelola secara optimal (Sofianto, 2019; Priyatna et al., 2020). Namun demikian, dalam praktiknya, pemanfaatan sistem informasi di lingkungan SKPA masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kompetensi SDM, kurangnya pelatihan teknis, serta belum adanya standar pengelolaan aplikasi yang terintegrasi dan berkelanjutan (Hanum, 2025).

Permasalahan lain yang turut mempengaruhi optimalisasi pengelolaan sistem informasi adalah kurangnya pemahaman teknis pegawai dalam mengoperasikan dan memelihara aplikasi yang digunakan. Hal ini berdampak pada tidak maksimalnya pemanfaatan sistem yang telah dikembangkan, sehingga belum mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja organisasi. Selain itu, tantangan keamanan informasi juga menjadi isu penting dalam pengelolaan sistem digital pemerintahan. Tanpa adanya sistem pengamanan yang memadai, potensi risiko seperti kebocoran data dan gangguan sistem dapat menghambat jalannya pelayanan publik (Ziemba et al., 2016). Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan teknologi informasi tidak hanya memerlukan dukungan infrastruktur, tetapi juga kesiapan SDM dan manajemen perubahan yang efektif (Gafar, 2017).

Dalam konteks pemerintahan daerah, optimalisasi pengelolaan sistem aplikasi informasi menjadi kebutuhan strategis untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Penerapan teknologi informasi yang terintegrasi dapat meningkatkan kualitas komunikasi publik, mempercepat proses pelayanan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Prisanda & Febrina, 2021; Fazil & Arifin, 2019). Selain itu, keberhasilan implementasi sistem digital juga sangat dipengaruhi oleh adanya kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, dan masyarakat (Syidky & Ikhbaluddin, 2025).

Sejalan dengan hal tersebut, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kapasitas SDM melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kolaborasi antara dosen dan instansi pemerintah dapat menjadi solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan teknis di lapangan, sekaligus mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Kegiatan pengabdian yang berbasis pelatihan dan pendampingan terbukti mampu meningkatkan kemampuan aparatur dalam mengelola sistem informasi secara lebih efektif dan profesional (Desembrianita et al., 2026).

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan upaya konkret untuk meningkatkan kapasitas SDM serta memperbaiki sistem pengelolaan aplikasi informasi di lingkungan SKPA Provinsi Aceh. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang sebagai bentuk intervensi akademik yang bertujuan untuk memberikan pemahaman teknis, meningkatkan keterampilan praktis, serta mendorong terciptanya mekanisme pengelolaan aplikasi yang lebih terstandar dan berkelanjutan. Dengan demikian, optimalisasi pengelolaan sistem aplikasi informasi diharapkan dapat mendukung peningkatan kinerja pemerintahan serta kualitas pelayanan publik di Provinsi Aceh secara menyeluruh.

Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan optimalisasi pengelolaan sistem aplikasi informasi di lingkungan SKPA Provinsi Aceh dirancang secara sistematis melalui beberapa tahapan yang terintegrasi guna memastikan tercapainya tujuan kegiatan secara efektif dan berkelanjutan. Pendekatan yang digunakan menggabungkan metode partisipatif, pelatihan berbasis praktik, serta pengembangan sistem yang adaptif terhadap kebutuhan pengguna.

Tahap awal kegiatan dimulai dengan proses persiapan dan perencanaan yang dilakukan melalui identifikasi kebutuhan mitra. Kegiatan ini meliputi survei awal, wawancara dengan pemangku kepentingan, serta analisis dokumen terkait pengelolaan sistem aplikasi yang telah berjalan. Proses identifikasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi eksisting, permasalahan yang dihadapi, serta kebutuhan pengembangan sistem di lingkungan SKPA. Hasil dari tahap ini kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan rencana kerja serta penentuan prioritas intervensi yang akan dilakukan.

Selanjutnya, tahap pengembangan dan implementasi sistem dilakukan dengan mengadopsi pendekatan Agile yang menekankan pada fleksibilitas, kolaborasi, dan keberlanjutan dalam pengembangan sistem. Pendekatan ini memungkinkan adanya penyesuaian secara bertahap berdasarkan kebutuhan pengguna dan dinamika organisasi (Himawan & Ikrimach, 2025). Proses ini mencakup perancangan sistem, pengembangan aplikasi, pengujian, serta integrasi sistem agar dapat berjalan secara optimal dalam mendukung aktivitas administrasi dan pelayanan publik. Pengembangan sistem yang terstruktur dan berbasis kebutuhan pengguna terbukti mampu meningkatkan efektivitas implementasi teknologi informasi dalam organisasi pemerintahan (Safira et al., 2023).

Tahap berikutnya adalah sosialisasi dan pelatihan kepada seluruh peserta yang berasal dari berbagai unit kerja di lingkungan SKPA. Sosialisasi bertujuan untuk memperkenalkan sistem aplikasi yang dikembangkan serta memberikan pemahaman mengenai manfaat dan fungsinya dalam mendukung kinerja organisasi. Sementara itu, pelatihan difokuskan pada peningkatan kemampuan teknis peserta dalam mengoperasikan dan mengelola aplikasi. Materi pelatihan meliputi pengelolaan data, pemanfaatan fitur aplikasi, teknik *troubleshooting*, serta aspek keamanan informasi. Pendekatan pelatihan berbasis praktik digunakan agar peserta dapat secara langsung mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dalam situasi kerja nyata.

Setelah sistem diimplementasikan, dilakukan tahap monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Monitoring dilakukan untuk mengamati kinerja sistem serta tingkat pemanfaatannya oleh pengguna, sedangkan evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan kegiatan berdasarkan indikator kinerja utama, seperti peningkatan efisiensi kerja, transparansi, serta kepuasan pengguna. Evaluasi ini juga menjadi dasar dalam melakukan perbaikan dan pengembangan sistem secara berkelanjutan. Penerapan sistem informasi yang efektif terbukti memberikan dampak positif terhadap fleksibilitas dan efisiensi pengelolaan organisasi pemerintahan (Bustanuddin et al., 2023).

Tahap akhir dalam metode pelaksanaan ini adalah pendampingan dan pemeliharaan sistem. Pendampingan dilakukan untuk membantu pengguna dalam mengatasi kendala teknis yang muncul selama penggunaan sistem, sekaligus memastikan keberlanjutan implementasi sistem di lingkungan SKPA. Sementara itu, pemeliharaan sistem meliputi pembaruan perangkat lunak, perbaikan kesalahan (*bug fixing*), serta pengembangan fitur baru berdasarkan masukan pengguna. Tahapan ini sangat penting untuk menjaga keberlangsungan sistem agar tetap relevan dengan kebutuhan organisasi serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Khalayak sasaran dalam kegiatan ini adalah seluruh pegawai di lingkungan SKPA Provinsi Aceh yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan aplikasi informasi, serta para pengambil kebijakan yang membutuhkan pemahaman terkait pengelolaan data dan sistem informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Dengan melibatkan berbagai level pengguna, diharapkan terjadi pemerataan pemahaman dan peningkatan kapasitas secara menyeluruh di lingkungan organisasi.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Gedung Hall Satpol PP Aceh pada tanggal 15–17 Mei 2024, mulai pukul 09.00 hingga 17.00 WIB. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan kapasitas dan aksesibilitas bagi peserta dari berbagai unit kerja SKPA. Seluruh tahapan pelaksanaan dirancang secara terstruktur mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi, sehingga kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pengelolaan sistem aplikasi informasi serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Aceh.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada optimalisasi pengelolaan sistem aplikasi informasi di lingkungan SKPA Provinsi Aceh menunjukkan capaian yang signifikan dalam berbagai aspek. Hasil kegiatan ini diukur berdasarkan beberapa indikator utama yang mencerminkan keberhasilan implementasi sistem serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.



Dari aspek kualitas sistem, aplikasi yang dikembangkan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, terutama dalam hal kemudahan penggunaan (user-friendly) dan kesesuaian dengan kebutuhan operasional masing-masing unit kerja. Sistem yang sebelumnya berjalan secara parsial kini telah terintegrasi, sehingga mempermudah alur kerja dan mempercepat proses pertukaran data antar unit. Integrasi ini memberikan dampak positif terhadap koordinasi internal serta mengurangi duplikasi pekerjaan.

Pada aspek kualitas informasi, data yang dihasilkan melalui sistem aplikasi menunjukkan peningkatan dalam hal akurasi, konsistensi, dan keandalan. Sistem mampu menyajikan informasi yang lebih terstruktur dan mudah diakses, sehingga mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Hal ini juga berdampak pada peningkatan efisiensi dalam penyelesaian tugas-tugas administratif.

Dari sisi kualitas layanan, implementasi sistem aplikasi yang terintegrasi memberikan perubahan yang nyata dalam pelayanan publik. Proses pelaporan, pengarsipan, dan distribusi informasi menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien. Kondisi ini tidak hanya meningkatkan kinerja internal organisasi, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap kualitas layanan yang diterima oleh masyarakat.

Selanjutnya, pada indikator penggunaan sistem, terjadi peningkatan tingkat adopsi aplikasi oleh pegawai SKPA setelah dilaksanakan pelatihan intensif. Pengguna menunjukkan tingkat kenyamanan yang lebih tinggi dalam menggunakan sistem untuk mendukung pekerjaan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan yang diberikan mampu meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis pengguna secara efektif.

Tingkat kepuasan pengguna juga menunjukkan hasil yang positif, di mana lebih dari 85% pengguna menyatakan puas terhadap sistem yang dikembangkan. Mereka menilai bahwa aplikasi tersebut mampu menyederhanakan proses kerja, meningkatkan produktivitas, serta mengurangi beban kerja administratif yang sebelumnya dilakukan secara manual.

Dari perspektif manfaat bersih (net benefit), program ini berhasil meningkatkan efisiensi operasional secara signifikan. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu mengalami pengurangan hingga 40%. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan data meningkat, yang berkontribusi pada peningkatan kepercayaan terhadap kinerja pemerintahan daerah.

Selain capaian tersebut, program ini juga berhasil meningkatkan kapasitas teknis sumber daya manusia melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan. Peserta tidak hanya memahami penggunaan sistem, tetapi juga memiliki kemampuan dalam mengelola data, melakukan troubleshooting, serta memahami pentingnya keamanan informasi. Secara keseluruhan, hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa optimalisasi sistem aplikasi informasi telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi di lingkungan SKPA Provinsi Aceh..

Pembahasan

Hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan sistem aplikasi informasi memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Temuan ini sejalan dengan konsep e-government yang menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam pelayanan publik. Integrasi sistem yang berhasil dilakukan dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa penerapan teknologi informasi yang tepat dapat memperbaiki proses kerja serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Jika dianalisis menggunakan model kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean, hasil kegiatan ini menunjukkan keterkaitan yang kuat antara kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan terhadap tingkat penggunaan sistem serta kepuasan pengguna. Sistem yang mudah digunakan dan mampu menghasilkan informasi yang akurat terbukti meningkatkan tingkat adopsi oleh pengguna. Hal ini kemudian berdampak pada meningkatnya kepuasan pengguna serta manfaat yang diperoleh organisasi secara keseluruhan.

Selain itu, pendekatan manajemen perubahan yang diterapkan dalam kegiatan ini juga menjadi faktor kunci keberhasilan. Pada tahap awal, terdapat resistensi dari sebagian pegawai terhadap penggunaan sistem baru. Namun, melalui sosialisasi yang efektif dan pelatihan yang berkelanjutan, resistensi tersebut dapat diminimalisasi. Pelibatan aktif pengguna dalam proses implementasi juga menciptakan rasa memiliki terhadap sistem, sehingga meningkatkan komitmen dalam penggunaannya.

Dari perspektif pembelajaran organisasi, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan program. Pegawai yang sebelumnya memiliki keterbatasan dalam pengelolaan

sistem informasi kini mampu mengoperasikan aplikasi secara mandiri dan lebih profesional. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan kompetensi individu dapat mendorong peningkatan kinerja organisasi secara kolektif.

Keberhasilan program ini juga menunjukkan pentingnya pendekatan kolaboratif antara akademisi dan pemerintah dalam mendukung transformasi digital. Keterlibatan perguruan tinggi dalam memberikan pelatihan dan pendampingan mampu menjembatani kesenjangan antara kebutuhan praktis di lapangan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendekatan ini terbukti efektif dalam menghasilkan solusi yang aplikatif dan berkelanjutan.

Meskipun demikian, beberapa tantangan masih ditemukan, seperti keterbatasan infrastruktur dan kebutuhan akan pemeliharaan sistem yang berkelanjutan. Namun, tantangan tersebut dapat diatasi melalui optimalisasi sumber daya yang ada serta pengembangan sistem secara bertahap sesuai dengan kebutuhan organisasi. Oleh karena itu, keberlanjutan program menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan agar manfaat yang telah dicapai dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan ini menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan sistem aplikasi informasi tidak hanya berfokus pada aspek teknologi, tetapi juga mencakup aspek manusia dan organisasi. Pendekatan yang terintegrasi antara teknologi, SDM, dan manajemen perubahan menjadi kunci utama dalam keberhasilan transformasi digital di lingkungan SKPA Provinsi Aceh. Dengan capaian yang telah diperoleh, program ini memiliki potensi untuk direplikasi di instansi pemerintah lainnya sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Kesimpulan

Pelaksanaan program pengabdian masyarakat untuk optimalisasi pengelolaan sistem aplikasi informasi di lingkungan SKPA Provinsi Aceh telah membuktikan efektivitas pendekatan terintegrasi yang berbasis teori dan praktik. Hasil program ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam kualitas sistem, informasi, dan layanan, serta memberikan dampak positif pada efisiensi operasional dan tingkat kepuasan pengguna. Keberhasilan ini dicapai melalui langkah-langkah strategis, seperti pengembangan sistem berbasis kebutuhan, pelatihan intensif, dan pendekatan kolaboratif. Selain itu, teori e-government, Theory of Change, dan Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone dan McLean telah memberikan kerangka kerja yang kuat dalam perancangan dan evaluasi program. Dengan demikian, inisiatif ini tidak hanya mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan transformasi digital yang berkelanjutan di lingkungan SKPA. Program ini dapat menjadi model yang diterapkan di instansi pemerintah lainnya, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan dan adaptasi terhadap kebutuhan lokal.

Daftar Pustaka

- Bustanuddin, B., Yamin, A., & Zulkieflimansyah, Z. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terhadap Fleksibilitas Pola Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di RSUD Asy-Syifa' Sumbawa Barat. *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(10), 8405-8410. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i10.3125>
- Desembrianita, E., Yusuf, K., Harun, S., Evianti, D., & Zaini, M. (2026). Sinergi Dosen dan Aparat Desa Dalam Meningkatkan Tata Kelola Administrasi Desa: Pengabdian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(3), 20013-20023. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5426>
- Fazil, M., & Arifin, A. (2019). Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pada Pemerintahan Gampong (Desa) Di Wilayah Pesisir Kota Lhokseumawe. *Jurnal Jurnalisme Volume*, 9(1).
- Gafar, T. F. (2017). Manajemen Perubahan dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintahan di Indonesia (Sebuah Pemikiran dalam Menyongsong Peralihan E-Government Menjadi E-Governance). *Cosmogov: jurnal ilmu pemerintahan*, 3(2), 153-170. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v3i2.14726>
- Gil-Garcia, J. R., & Pardo, T. A. (2005). E-government success factors: Mapping practical tools to theoretical foundations. *Government Information Quarterly*, 22(2), 187–216. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2005.04.002>
- Hanum, C. S. (2025). PENATAAN ASN PENGELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) PEMERINTAH ACEH. *Jurnal Analis Kebijakan*, 9(1), 16-20. <https://doi.org/10.37145/491yw323>

- Himawan, D. B., & Ikrimach, I. (2025). Optimalisasi Pelayanan Pasien Melalui Aplikasi Antrian Berbasis Mobile Menggunakan Metode Agile: Optimalisasi Pelayanan Pasien Melalui Aplikasi Antrian Berbasis Mobile Menggunakan Metode Agile. *MALCOM: Indonesian Journal of Machine Learning and Computer Science*, 5(1), 273-282. <https://doi.org/10.57152/malcom.v5i1.1753>
- Janowski, T. (2015). Digital government evolution: From transformation to contextualization. *Government Information Quarterly*, 32(3), 221–236. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.04.001>
- Lee, J., & Moon, M. J. (2020). E-government and digital governance. In *Routledge Handbook of Korean Politics and Public Administration* (pp. 328-344). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315660516>
- Lukman, F. A., & Al Ghalib, M. F. (2025). The Structural Transformation of Land Administration Institutions in Aceh Province within the Framework of Public Land Administration Services Based on the General Principles of Good Governance (AAUPB). *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 5(2). <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v5i2.4560>
- Munandar, A. (2025). *PERANAN PEMERINTAH DALAM PEMBENTUKAN QANUN GAMPONG BERDASARKAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG (Studi Penelitian Gampong Cot Bada Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara)* (Doctoral dissertation, Universitas Malikussaleh).
- Pakaya, N. F. P., Wanci, P., Abraham, H. H. E., Rindengan, Y. D. Y., & Yusupa, A. (2026). Analisis Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Publik di Indonesia. *Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 12-19. <https://doi.org/10.63822/dgw2zg89>
- Prisanda, E., & Febrina, R. (2021). Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi Berbasis Aplikasi SISPEDAL Dalam Rangka Mewujudkan Good Village Governance. *Journal of Governance Innovation*, 3(2), 155-171. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v3i2.723>
- Priyatna, C. C., Prastowo, F. A. A., Syuderajat, F., & Sani, A. (2020). Optimalisasi teknologi informasi oleh lembaga pemerintah dalam aktivitas komunikasi publik. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 8(1), 114-127. <https://doi.org/10.24198/jkk.v8i1.26115>
- Safira, S. N., Mursityo, Y. T., & Saputra, M. C. (2023). Pengembangan Sistem Monitoring Pendataan Aplikasi Berbasis Web pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 10(5), 983-992. <https://doi.org/10.25126/jtiik.2023106891>
- Saraswati, N. M. A. I., Widanti, N. P. T., & Dewi, N. D. U. (2025). PERAN DIGITAL MINDSET, PEMAHAMAN GOOD GOVERNANCE DAN KOMPETENSI DIGITAL TERHADAP PEMBENTUKAN SMART ASN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 12(1), 440-458. <https://doi.org/10.56015/gjikplp.v12i1.523>
- Sofianto, A. (2019). Inovasi Manajemen Pemerintahan Berbasis Aplikasi Digital di Provinsi Jawa Tengah. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 3(2), 99-108. <https://doi.org/10.21787/mp.3.2.2019.99-108>
- Supriyanto, E. E. (2016). Kebijakan inovasi teknologi informasi (IT) melalui program elektronik government dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, 1(1), 141–161. <https://doi.org/10.24905/jip.1.1.2016.141-161>
- Syidky, M. F., & Ikhbaluddin, I. (2025). *KOLABORASI PEMERINTAH DALAM PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KABUPATEN BIREUEN* (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Ziemba, E., Papaj, T., Żelazny, R., & Jadamus-Hacura, M. (2016). Factors influencing the success of e-government. *Journal of Computer Information Systems*, 56(2), 156-167. <https://doi.org/10.1080/08874417.2016.1117378>